



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan**

Jln. H. Agus Salim Painan, (0756) 21602
<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id//>

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpolu serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Painan, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah laporan kinerja tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan 11 Sasaran Strategis dan 27 Indikator kinerja utama. Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

MISI 4 : Mewujudkan kabupaten pesisir selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 4 sebesar 125,21%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 4

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian(%)
1.1	Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah	1	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	Jenis	3	10	333,33
1.2	Meningkatnya benda cagar budaya yang lestari		Jumlah cagar budaya yang lestari	Jenis	20	24	120

MISI 5 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (Empat) Indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 96,45%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian Indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian(%)
1.1	Meningkatkan akses Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,43	101,93
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,33	13,35	100,15
1.2	Meningkatnya daya saing pendidikan	1	Lembaga pendidik SD dan SMP akreditasi A (jml)	Persen	65	11,13	17,12
		2	Inovasi Pendidikan	Inovasi	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 5							

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Struktur dan Organisasi.....	5
E. Sumber Daya Manusia.....	7
BAB II Perencanaan Kinerja	9
A. Perencanaan Kinerja.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	14
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja.....	14
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	14
3.3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	16
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	27
BAB IV Penutup	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Upaya Dimasa Mendatang.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LKj (Laporan Kinerja) dibuat sebagai implementasi Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik (Renstra).

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus sendiri urusan Pemerintah berdasarkan asas-asas otonomi dan tugas pembentukan.

Otonomi seluas-luasnya dalam arti diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan masyarakat secara luas dan komprehensif, tentunya semuanya itu berpijak pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan perkembangan dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif, perlu untuk mempertanggungjawabkan secara tepat, jelas, terukur dan sah sehingga keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik yang dikenal dengan nama Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 ini yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas Instansi beserta seluruh jajarannya kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, oleh sebab itu LKj merupakan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 2022 merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 1 (satu) tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa alokasi anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
- w. Peraturan Bupati Kabupaten pesisir selatan nomor 84 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

LKj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud sebagai evaluasi kinerja, umpan balik peningkatan kinerja, peningkatan perencanaan/program di bidang pembangunan pendidikan, meningkatkan kredibilitas instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Pesisir Selatan dan mengetahui/menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pada gilirannya menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan informasi, evaluasi, dan implementasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan sekaligus sebagai bahan kajian untuk program / kegiatan di tahun selanjutnya serta sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dan bahan dalam pengambilan kebijakan.

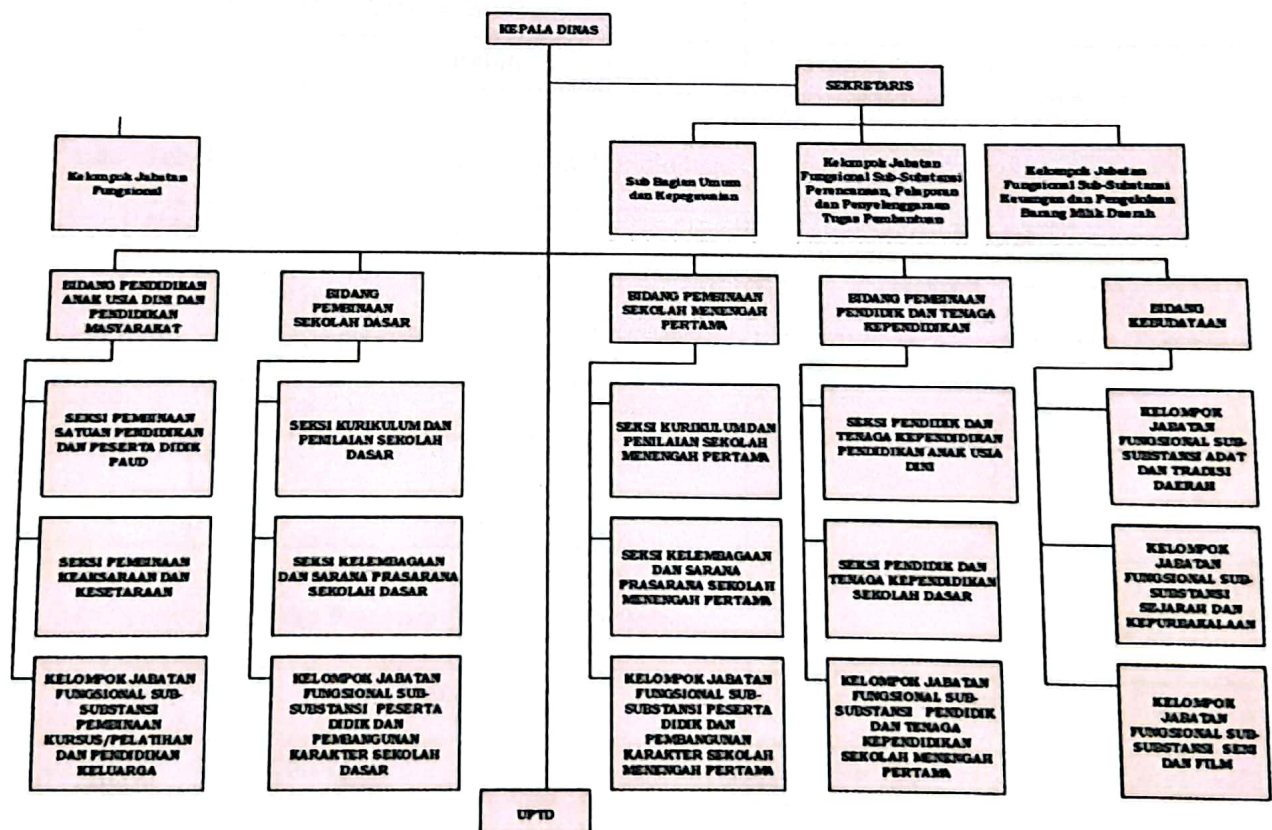
D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat daerah . Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu :
 1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD;
 - b. Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga
 2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
 3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

4. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Adat dan Tradisi Daerah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni dan Film;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Keperbukalan
6. UPTD

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



E. Sumber Daya Manusia

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut diuraikan dalam bentuk tabel :

1. Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Struktural	16	28,07
2	Fungsional Tertentu	22	38,60
3	Fungsional Umum	19	33,33
	Jumlah	57	100,00

2. Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Struktural Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	9
4	Fungsional Tertentu	22
5	Fungsional Umum (Staf)	19
	Jumlah	57

3. Tabel 1.3. Data Pegawai Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	19
2	Strata 1 (S1)	23
3	Diploma 3 (D3)	3
4	SLTA	12
	Jumlah	57

4. Tabel 1.4. Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	23
2	Golongan III	25
3	Golongan II	9
	Jumlah	57

Berdasarkan tabel – tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 57 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 16 orang, pegawai fungsional tertentu sebanyak 22 orang, dan Fungsional umum sebanyak 19 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 57 orang diatas, terdiri terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 6 orang, pejabat eselon IV sebanyak 9 orang, staf berjumlah 19 orang. Sementara untuk jumlah pegawai fungsional ter tentu yang berjumlah 22 orang terdiri dari pengawai dinas 9 orang dan dari pengawas SMP 13 orang. Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan terdiri dari, lulusan strata dua (S2) sebanyak 19 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 23 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 3 orang, dan lulusan SLTA sebanyak 12 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 23 orang, golongan III sebanyak 25 orang, golongan II sebanyak 9 orang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rentrsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional", adapun misinya adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Dari Enam misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi lima untuk urusan pendidikan dan misi empat untuk urusan kebudayaan. Dari misi lima tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah *"Terwujudnya pendidikan yang berkualitas"*. Dari misi lima tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah: *"Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas"*. Dengan sasaran " antara lain : 1). *Meningkatnya akses layanan bidang Pendidikan, dan 2). Meningkatkan Daya Saing Pendidikan*".

Sementara itu, untuk urusan yang terkait pada Kebudayaan ada pada misi empat, dengan tujuan: *"Meningkatnya perekonomian bidang pariwisata"*. Dengan sasaran "Meningkatnya kontribusi kekayaan budaya dalam pembangunan pariwisata.

Adapun kebijakan umum pembangunan pemerintah daerah pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan antara lain adalah :

1. Meningkatnya Rata-rata lama sekolah;
2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah;
3. Mewujudkan Pesisir Selatan Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak (Pasisia Rancak);
4. Meningkatnya Fungsi dan Peran Lembaga adat dan agama
5. Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam Penetapan Kinerja/ Perjanjian kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,33 Tahun
		Rata- Rata Lama Sekolah	8,27 Tahun
		APK PAUD	62,92 %
		APK SD	110,52 %
		APK SMP	86, 48 %
		APM SD	99,53 %
		APM SMP	65 %
2	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Lembaga Pendidik SD dan SMP Akreditasi A	65 %

		Inovasi Pendidikan	1 Inovasi
3	Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan local dan Sejarah	Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan	3 Jenis
4	Meningkatnya benda cagar budaya yang lestari	Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	20 Jenis

Tabel 2.2.
Anggaran Tahun 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	460,251.919.530	APBD
2	Pengelolaan Pendidikan	143.902.362.033	APBD & DAK
3	Pengembangan Kurikulum	99.149.870	APBD
4	Pengembangan Kebudayaan	501.200.666	APBD
5	Pengembangan Kesenian Tradisional	564.999.940	APBD
6	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	185.919.970	APBD
Jumlah		605.505.552.009	

C. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA /PENANGGUNG JAWAB	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	<u>jumlah penduduk usia 7 th yang bersekolah</u>	Bidang Pembinaan PAUD, SD dan SMP	13,33	13,33	13,34	13,34	13,35	13,35
		Jumlah penduduk usia 7 th di tahun 2022							
	Rata-Rata Lama Sekolah	<u>Lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun</u>	Bidang Pembinaan PAUD, SD dan SMP						
		<u>jumlah penduduk usia 25 tahun keatas</u>		8,27	8,27	8,28	8,28	8,29	8,29
	APK PAUD	<u>Jumlah Peserta Didik Paud</u>	Bidang PAUD DIKMAS	62,30	62,92	63,55	64,19	64,83	65,48
		<u>Penduduk usia 4 sd 6 tahun</u>							
	APK SD	<u>Jumlah siswa SD</u>	Bidang Pembinaan SD	111,64	110,52	109,42	108,32	107,24	106,17
		<u>Jumlah penduduk usia 13 sd 12 Tahun</u>							
	APK SMP	<u>Jumlah Siswa SMP</u>	Bidang Pembinaan SMP	85,63	86,48	87,35	88,22	89,10	90,00
		<u>Jumlah Penduduk usia</u>							

	APM SD	<u>13 sd 15 Tahun</u>	Bidang Pembinaan SD	99,48	99,53	99,58	99,63	99,68	99,73
		Jumlah peserta siswa SD usia 7 sd 12 Tahun							
	APM SMP	Jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun	Bidang Pembinaan SMP	79,64	80,43	81,24	82,05	82,87	83,70
		Jumlah peserta siswa SMP usia 13 sd 15 tahun							
Meningkatnya daya saing pendidikan	Lembaga pendidikan SD dan SMP akreditasi A (jml)	Jumlah penduduk usia 13 dan 15 tahun	Bidang Pembinaan GTK, SD dan SMP	60	65	70	75	80	85
		Jumlah Sekolah Berakreditasi A							
Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	Jumlah Sekolah keseluruhan	Bidang Budaya	2	3	4	5	6	7
		Jumlah seni budaya yang terinventarisir							
Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestari	Jumlah cagar budaya yang dilestari	Jumlah cagar budaya yang dirawat	Bidang Budaya	18	20	22	24	26	28
		Jumlah cagar budaya yang terinventarisir							

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja

Sesuai kontrak kerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis beserta indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100%	Sangat Berhasil
II	91% - 100%	Berhasil
III	81% - 90%	Cukup Berhasil
IV	<81%	Kurang Berhasil

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4 sasaran dan 11 indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara

keseluruhan tingkat capaian kinerja kegiatan rata-rata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah " Sangat Berhasil" dengan nilai 116,00 %.

Berikut adalah hasil pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022
Sesuai Revisi Renstra Tahun 2016-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan akses pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah	8,27	8,43	101,93
		2. Harapan Lama Sekolah	13,33	13,35	100,15
		1. APK PAUD	62,92	63,48	100,89
		2. APK SD	110,52	101,63	91,96
		3. APK SMP	86,48	102,28	118,27
		4. APM SD	99,53	91,27	91,70
		5. APM SMP	80,43	82,6	102,70
2	Meningkatnya daya Saing Pendidikan	Lembaga Pendidik SD dan SMP Akreditasi A (jml)	65	11,13	17,12
		Inovasi pendidikan	1	1	100
3	Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	3	10	333,33
4	Meningkatnya benda cagar budaya yang direvitalisasi	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	20	24	120,00
Jumlah Capaian Kinerja					1278,25%
Rata-rata Persentase Capaian					116,20%

Pada tabel 3.1 tersebut menunjukkan pelaksanaan 11 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 rata-rata menunjukkan capaian 100% bahkan melebihi. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator, sehingga penetapan target dan pengukuran realisasinya berdasarkan data tahunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level *outcome*, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja indikator secara langsung.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar OPD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni, yang ketergantungan terhadap data penduduk dan wilayah.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam meningkatkan akses dan daya saing pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat belajar dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih dari peringkat IPM periode sebelumnya.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatkan Akses dan daya saing Pendidikan diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama yang ada dalam perjanjian kinerja yaitu :

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1, Meningkatkan Akses Pendidikan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,43	101,93
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,33	13,35	100,15
3	APK PAUD	%	62,92	63,48	100,89
4	APK SD	%	110,52	101,63	91,96
5	APK SMP	%	86,48	102,28	118,27
7	APM SD	%	99,53	91,27	91,70
8	APM SMP	%	80,43	82,6	102,70

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir.

Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun. Langkah-langkah penghitungannya adalah sebagai berikut:

- A. Dari data mikro yang digunakan, seleksi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.
- B. Hitung lamanya sekolah setiap penduduk berumur 25 tahun ke atas tersebut.
 - a) Jika partisipasi sekolahnya adalah tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolahnya adalah 0.

- b) Jika partisipasi sekolahnya adalah masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolahnya mengikuti tabel konversi berikut.

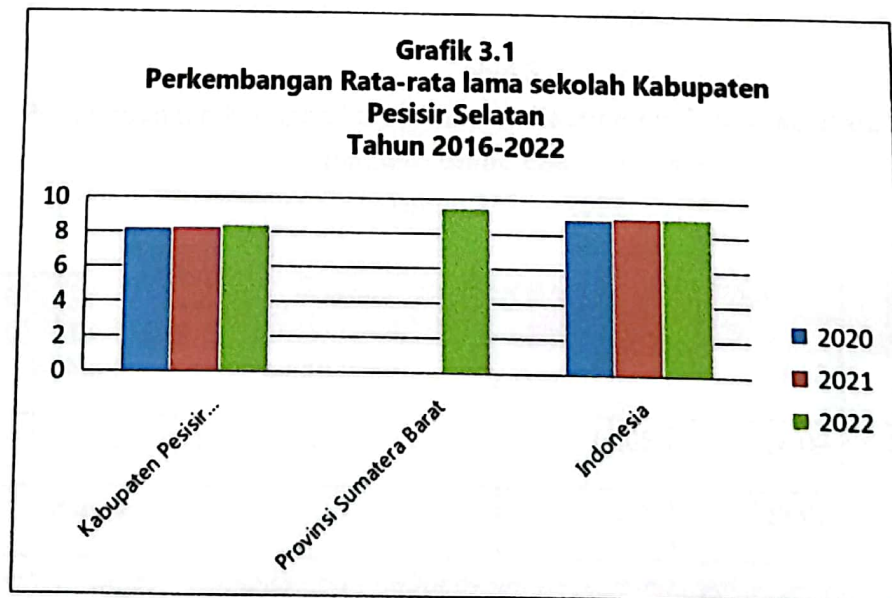
Berikut rumus mencari Rata-rata Lama Sekolah :

$$\text{Rata - Rata Lama Sekolah} = \frac{\text{Lama Sekolah Penduduk usia 25 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas}}$$

Tabel 3.2
Perkembangan Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia Tahun 2020 – 2022

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	Kabupaten pesisir selatan	8,26	8,27	8,43
2	Provinsi sumatera barat	9,34	9,46	9,51
3	Indonesia	8,97	9,08	9,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2022



Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan rata-rata lama sekolah, dimana untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebesar 8,26 naik menjadi 8,43, untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 9,34 naik menjadi 9,51 dan untuk wilayah Indonesia tahun 2020 sebesar 8,97 naik menjadi 9,08 di tahun 2022.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun.

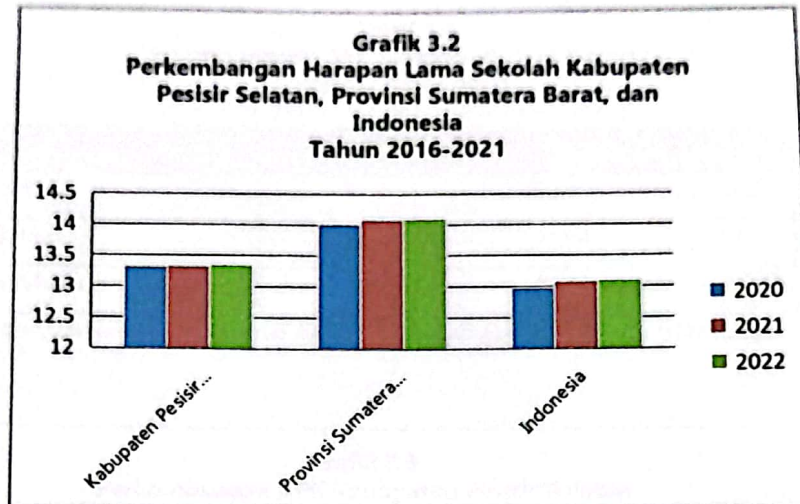
Berikut rumus mencari Harapan Lama Sekolah :

$$\text{Harapan Lama Sekolah} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 tahun di tahun 2022}}$$

Tabel 3.3
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia
Tahun 2020 – 2022

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	Kabupaten pesisir selatan	13,32	13,33	13,35
2	Provinsi sumatera barat	14,05	14,09	14,10
3	indonesia	12,98	13,08	13,10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2022



Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan Harapan Lama Sekolah, dimana untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 sebesar 13,05 naik menjadi 13,34 pada tahun 2022 dan untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 13,79 naik menjadi 14,10 di tahun 2022 sedangkan untuk wilayah Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 menjadi 13,10 di tahun 2022.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak yang diluar usia sekolah.

Berikut rumus mencari APK :

$$\text{APK Paud} : \frac{\text{Jumlah siswa PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 4-6 tahun}}$$

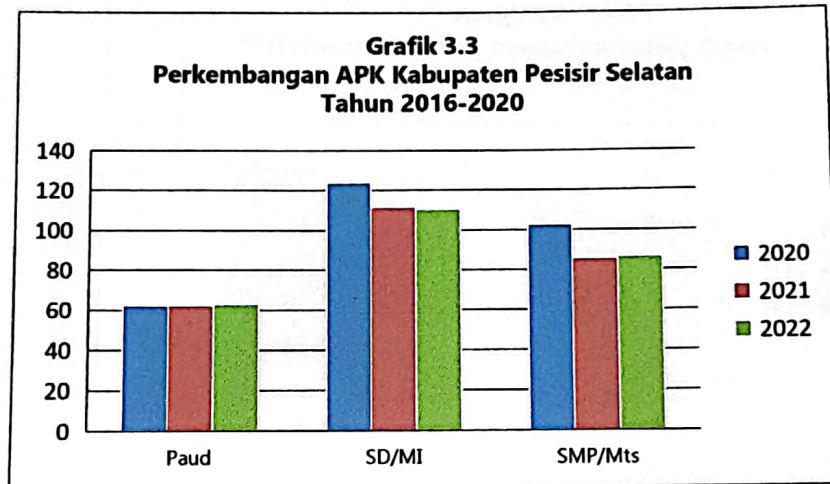
$$\text{APK SD/MI} : \frac{\text{Jumlah siswa SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}$$

$$\text{APK SMP/MTs} : \frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}}$$

Tabel 3.4
Perkembangan APK Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2020- 2022

No	Jenjang	2020	2021	2022
1	Paud	62,30	62,30	62,92
2	SD/MI	124,01	111,64	110,52
3	SMP/MTs	102,39	85,63	86,48

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2022



Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan APK , dimana untuk jenjang Paud tahun 2016 sebesar 45,29% naik menjadi 62,30% pada tahun 2022, untuk jenjang SD tahun 2016 sebesar 124,18 % turun menjadi 110,52 % dan untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 sebesar 99,46 % naik menjadi 86,48 % di tahun 2022.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Berikut rumus mencari APM :

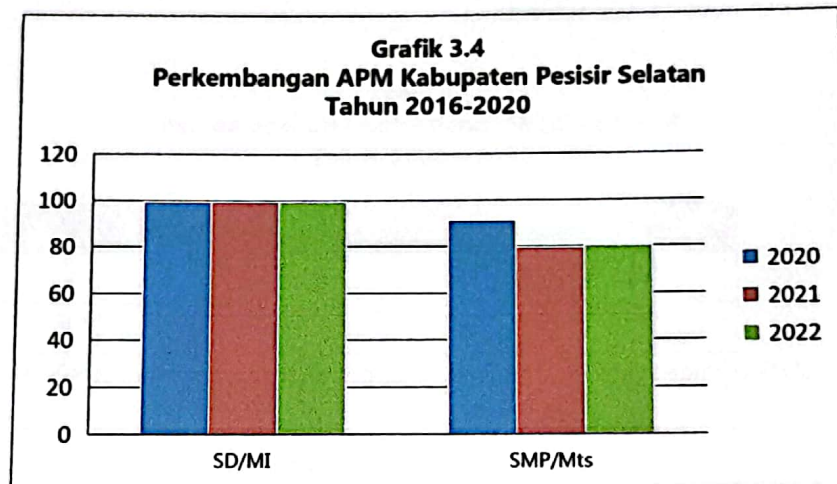
APM SD/MI : $\frac{\text{Jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}$

APM SMP/MTs : $\frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}}$

Tabel 3.5
Perkembangan APM Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2020 – 2022

No	Jenjang	2020	2021	2022
1	SD/MI	99,53	99,48	99,53
2	SMP/MTs	91,38	79,64	80,43

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2022



Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan APM, dimana untuk jenjang SD/MI tahun 2020 sebesar 99,53 % tetap menjadi 99,53 % pada tahun 2022 dan untuk jenjang SMP/MTs tahun 2020 sebesar 91,38 % turun menjadi 80,43 % di tahun 2022.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2. Meningkatnya daya saing Pendidikan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Lembaga Pendidik SD dan SMP akreditasi A (jml)	Persen	60	58	96,66
2	Inovasi Pendidikan	Inovasi	1	1	100

1. Lembaga Pendidik SD dan SMP akreditasi A (jml)

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

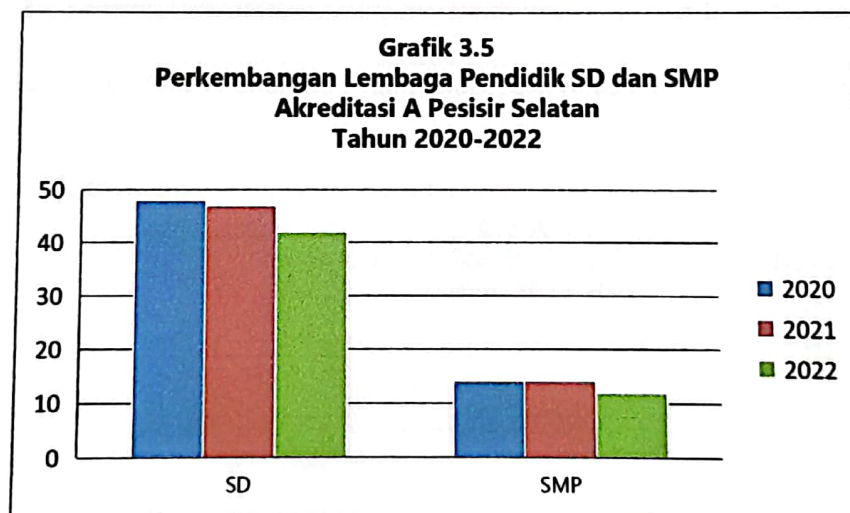
Berikut rumus mencari :

$$\text{Lembaga pendidik SD dan SMP akreditasi A (jml)} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi}}{\text{Jumlah Sekolah keseluruhan}}$$

Tabel 3.6
Perkembangan Lemba Pendidik SD dan SMP
Tahun 2020 – 2022

No	Jenjang	2020	2021	2022
1	SD	48	47	42
2	SMP	14	14	12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2022



Peningkatan Perkembangan Lembaga Pendidik SD dan SMP terlihat pada tabel dan grafik, dimana untuk jenjang SD tahun 2020 sebesar 48 sekolah turun menjadi 42 sekolah pada tahun 2022 dan untuk jenjang SMP tahun 2020 sebesar 14 sekolah turun menjadi 12 sekolah di tahun 2022.

5. Revitalisasi Kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah

Persentase Seni Budaya yang dilestarikan menunjukkan berapa banyak seni budaya yang telah dilestarikan/ yang dikembangkan dalam bentuk persen (%).

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Seni budaya yang dilestraikan	Unit	3	10	333,33

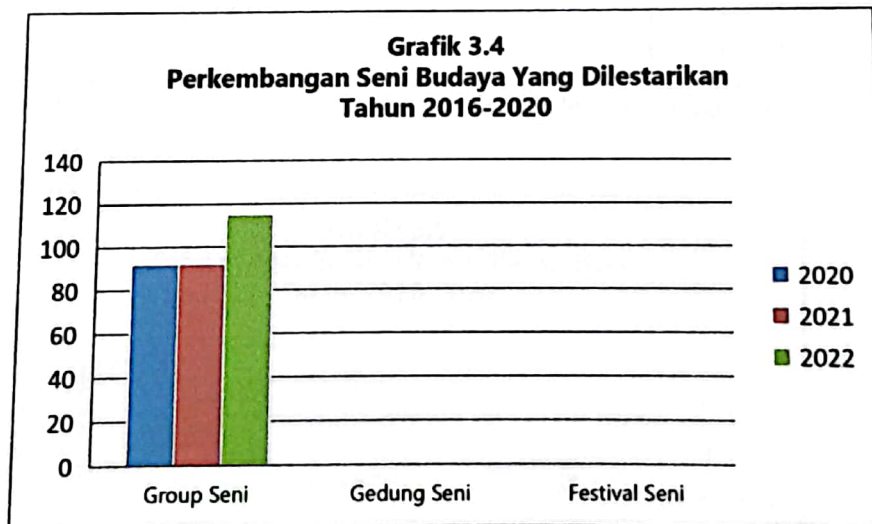
Tabel 3.5

Perkembangan Seni Budaya yang dilestarikan

Tahun 2020 - 2022

No	Kegiatan	2020	2021	2022
1	Jumlah Group Kesenian	92	94	115
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0
3	Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	0	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2022



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan seni budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 mengalami penurunan diakibatkan efisiensi anggaran APBD untuk bidang kebudayaan. Untuk itu diharapkan kedepannya jika anggaran sudah ada maka hasilnya akan lebih meningkat dari pada tahun ini.

6. Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestarikan

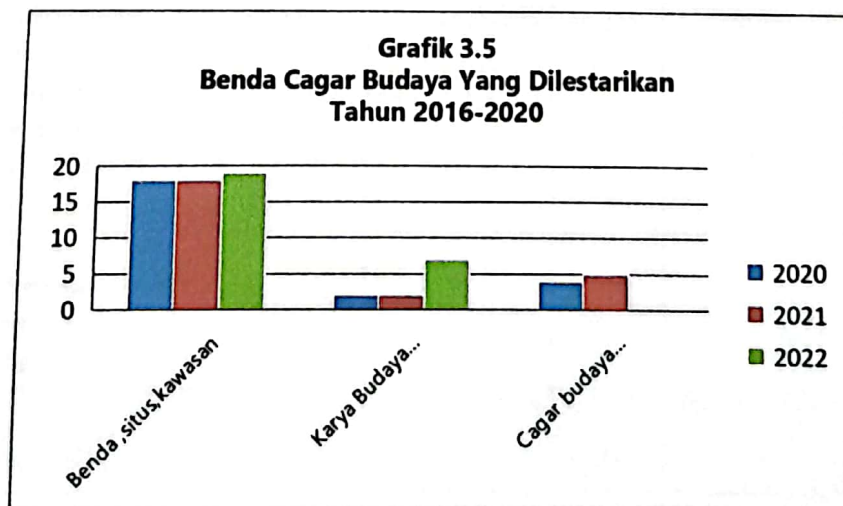
Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan menunjukkan berapa banyak cagar budaya yang telah dilestarikan/ yang dikembangkan.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah cagar budaya yang lestaRI	Unit	20	24	120,00

Tabel 3.6
Benda Cagar Budaya yang dilestarikan
Tahun 2020-2022

No	Kegiatan	2020	2021	2022
1	Benda,situs, dan kawasan cagar budaya	18	18	19
2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	2	7
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4	5	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2022



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan Cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 mengalami penurunan diakibatkan efisiensi anggaran APBD untuk bidang kebudayaan. Untuk itu diharapkan kedepannya jika anggaran sudah ada maka hasilnya akan lebih meningkat dari pada tahun ini.

Tabel 3.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d 2022

No	Program 2021	Program 2021	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	482.153.074.958	445.851.412.883	92,47 %	460.251.919.530	427.876.389.893	92,97%
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	113.029.047.095	109.337.879.231	96,73 %	143.902.362.033	140.810.406.315	97,85 %
3	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	121.705.379	106.564.500	87,56 %	99.149.870	97.423.500	98,26 %
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	10.918.853,262	9.438.244.500	86,44 %	-	-	-
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	448.990.880	445.584.880	99,24 %	501.200.666	498.177.465	99,43 %
6		Program Pengembangan Kesenian Tradisional				564.999.830	564.640.000	99,94 %
6	Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	313.173.792	310.797.200	99,24 %	185.919.970	185.784.875	99,93 %
Jumlah			606.984.845.366	565.490.483.144	93,16 %	605.505.552.009	570.032.822.047	95,33 %

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2022 mengalokasikan Jumlah Belanja Operasi sebesar Rp. 525.026.530.648,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 53.479.021.361. Data anggaran dan realisasi DPPA Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2022 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan akses pendidikan	142.428.860.079	139.397.330.445	97,87 %
2	Meningkatnya daya saing Pendidikan	461.824.571.354	429.386.889.263	92,98 %
3	Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan local dan sejarah	1.066.200.606	1.062.817.465	90,36 %
4	Meningkatnya benda cagar budaya yang lestari	185.919.970	185.784.875	99,93 %
Jumlah		605.505.552.009	570.032.822.047	95,33 %

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 605.505.552.009 dengan belanja Operasi sebesar Rp. 581.784.997.052 dan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 570.032.822.047 atau capaian kinerja keuangan sebesar 95.33 %.

Beberapa hambatan dan kendala daya serap APBD dan APBN sesuai atau mencapai target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, antara lain adalah :

1. Perencanaan dari program dan kegiatan kurang realistis, komprehensif, dan integratif;

2. Kegiatan fisik yang memerlukan proses lelang, waktu pelaksanaan untuk mengikuti proses lelang tidak mencukupi;

Untuk meminimalkan kendala dan hambatan capaian kinerja meningkatnya daya serap APBD dan APBN sebagaimana tersebut diatas maka beberapa hal dibawah ini dirasa perlu untuk dilakukan, yaitu :

1. Membuat rencana program dan kegiatan yang lebih realistis, komperhensif dan terintegrasi antara program yang satu dengan program lainnya;
2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses lelang;

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian Sasaran

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran, 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026. Secara Keseluruhan tingkat capaian sasaran strategis telah mencapai target, dengan capaian targetnya 100 %.

2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 11 yaitu : Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama sekolah, APK PAUD, APK SD, APK SMP, APM SD, APM SMP, Lembaga Pendidik SD dan SMP Akreditasi A, Inovasi Pendidikan, jumlah seni budaya yang dilestarikan dan persentase benda cagar budaya yang dilestari. Dari 11 Indikator Kinerja Utama tersebut dapat di simpulkan bahwa secara umum telah mencapai target Karena Rata-rata menunjukkan capaian 99,33 %.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran

Belanja daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 525.476.517.839,50 atau 87,88% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 605.505.552.009 Dari 4 (empat) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah "Meningkatnya benda cagar budaya yang lestari yaitu 99,36 % dan Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan local dan sejarah " yaitu 90,36 % serta Meningkatnya daya saing 92,98 % dan terendah adalah "Meningkatkan akses pendidikan" yaitu 66,59 %.

B. Saran

Untuk Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022, Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan perencanaan strategis yang di dalamnya berisi tujuan dan sasaran strategis yang harus dipertanggung jawabkan, sasaran strategis tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk Pengukuran Kinerja yang ideal perlu dijelaskan unsur-unsur Renstra yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Strategis dan faktor pendukung keberhasilan yang akan ditemukan

Dalam rangka pencapaian misi tersebut, dimana dalam perumusan Visi dan Misi disesuaikan dengan keadaan operasional lapangan.

Painan, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



SALIM MUHAJIRIN, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001